

ORASI ILMIAH GURU BESAR

**KETIMPANGAN PEMBANGUNAN
ANTAR WILAYAH DI INDONESIA:
FAKTA DAN STRATEGI INISIATIF**

ORASI ILMIAH

**Guru Besar Tetap
Fakultas Ekonomi dan Manajemen**

Prof Dr Muhammad Firdaus, SP, MSi

**AUDITORIUM REKTORAT
GEDUNG ANDI HAKIM NASOETION
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2013**



Ucapan Selamat Datang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarohatuh

Selamat pagi

Yang terhormat

Rektor IPB

Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanah IPB

Ketua dan Anggota Senat Akademik IPB

Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar IPB

Para Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Departemen dan Pejabat di lingkungan IPB.

Rekan-rekan Dosen, tenaga Kependidikan, Alumni, Karyawan, dan Mahasiswa IPB yang saya cintai.

Keluarga dan para undangan yang saya hormati dan muliakan.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat, Hidayah, dan KaruniaNya yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini menghadiri dan menyimak Acara Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB dalam rangka Dies Natalis IPB ke-50. Pada kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan pidato ilmiah yang berjudul **Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah di Indonesia: Fakta dan Strategi Inisiatif.**





Prof Dr Muhammad Firdaus, SP, MSi



Daftar Isi

Ucapan Selamat Datang	iii
Foto Orator	v
Daftar Isi	vii
1. Pendahuluan	1
2. Landasan Pemikiran	5
2.1. Makna Pembangunan Wilayah untuk Negara Berkembang.....	5
2.2. Tesis Williamson dan Lingkaran Setan dalam Pembangunan Wilayah	6
2.3. Teori Konvergensi Pembangunan Wilayah dan Metode Ekonometrika Data Panel.....	8
3. Fakta Empirik Ketimpangan Pembangunan Wilayah Indonesia	11
3.1. Ketimpangan antar Wilayah dari Berbagai Indikator Kemajuan Ekonomi	11
3.2. Pembangunan Ekonomi Wilayah di Indonesia: Kovergensi atau Divergensi?	18
3.3. Ketimpangan Investasi antar Wilayah di Indonesia.....	22
4. Strategi Inisiatif.....	25
4.1. Pengalaman Negara Lain dan Pengelolaan Dana Perimbangan	25
4.2. Strategi Inisiatif di Tingkat Mikro Perdesaan	29
5. Penutup.....	34
Daftar Pustaka	35
Ucapan Terima Kasih	41
Riwayat Hidup	45

I. Pendahuluan

Masalah ketidakmerataan dalam pembangunan wilayah adalah masalah historis yang dihadapi oleh setiap negara mulai dari aras kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kepulauan bahkan global. Dunia belahan selatan dianggap lebih tertinggal daripada belahan utara. Beberapa negara seperti USA, China, dan Thailand menghadapi permasalahan yang berkebalikan dengan Indonesia: pembangunan wilayah bagian barat lebih tertinggal dibandingkan dengan bagian timur. Pulau Jawa bagian selatan secara umum lebih tertinggal dibandingkan daerah utara, atau kawasan pantai timur Sumatera yang lebih maju daripada kawasan pantai barat. Pada tingkat kabupaten misalnya, wilayah barat Kabupaten Bogor memiliki pertumbuhan baik ekonomi dan kesejahteraan (diindikasikan tingkat pengangguran dan kemiskinan) yang lebih buruk dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Bogor bagian tengah dan timur. Terjadinya fenomena tersebut dapat disebabkan oleh faktor keterbukaan/akses terhadap luar wilayah yang sudah berlangsung sejak lama. Ini menghasilkan ukuran pasar yang lebih besar karena konsentrasi jumlah penduduk di wilayah yang lebih maju tersebut; meskipun wilayah yang kurang berkembang tersebut banyak yang lebih kaya dengan sumberdaya alam.

Perhatian pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah sudah ada. Sebagai contoh masalah tersebut sudah menjadi bagian dari Kondisi Umum Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Fakta empirik dan beberapa studi menunjukkan ketimpangan antar wilayah di Indonesia semakin mengemuka sejak pertengahan tahun 1995 sampai sekarang dibandingkan dengan periode sebelumnya,

terutama sejak 2005 (Akita and Kawamura, 2002; Shankar and Shah, 2003; Firdaus and Yusop, 2009; Kuntjoro, 2013). Dirasakan pula, dengan wewenang Pemerintah Daerah yang semakin besar sejak otonomi dan desentralisasi fiskal, terjadi ketimpangan yang semakin signifikan antara rencana pembangunan di tingkat pusat dengan implementasinya di tingkat daerah, khususnya kabupaten dan kota.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia ternyata menempati peringkat **teratas** (baca: terburuk) bila diambil perbandingan dengan beberapa negara baik maju maupun berkembang. Lessmann (2011), seorang profesor muda dari Jerman bahkan memberikan catatan bahwa Indonesia adalah *outlier*, karena memiliki CV¹ pendapatan wilayah yang melewati angka 1 untuk data periode 2004-2008. Setelah dihitung kembali dengan menggunakan periode dan sumber data yang sama (BPS), diperoleh CV pendapatan wilayah yang lebih rendah untuk Indonesia yaitu 0,97; namun tetap tertinggi dibandingkan negara lain, termasuk Thailand dan China yang dikenal buruk dalam pemerataan pembangunan antar wilayahnya. Bila perhitungan ditarik ke belakang, yaitu data 1980-2011, tetap diperoleh angka CV tertinggi untuk Indonesia yaitu sebesar 0,93. Pada tahun 2011, rasio PDRB per kapita rata-rata provinsi di Jawa masih lebih dari 300 persen PDRB per kapita rata-rata provinsi di Sulawesi, Nusatenggara dan Maluku.

¹CV, coefficient of variation: salah satu ukuran untuk melihat seberapa besar variasi dari pengamatan. Diperoleh dari rasio simpangan baku terhadap rata-rata. Semakin tinggi nilai CV, berarti pengamatan semakin bervariasi. Dalam studinya Lessemann menemukan untuk data 2004 s.d. 2008 (pasca otonomi daerah), CV produk domestik regional bruto (PDRB) antar wilayah di Indonesia sebesar 1,23; sedangkan Thailand dan China masing-masing 0,88 dan 0,68. Nilai CV terendah diperoleh a.l. untuk Korea Selatan, Selandia Baru, Denmark dan Swedia yang berkisar antara 0,09 - 0,11.

Mazhab neoklasik memprediksi secara lambat laun ketimpangan dalam pembangunan antar wilayah akan hilang dengan sendirinya. Prediksi ini beranjak dari anggapan bahwa wilayah yang kurang berkembang memiliki rasio modal terhadap tenaga kerja yang lebih rendah, sehingga produktivitas marginal dari investasi setiap satuan modal lebih tinggi di wilayah yang kurang berkembang. Akibatnya akan terjadi proses *catch-up* dari wilayah yang kurang berkembang terhadap wilayah maju. Teori yang berkembang sesudahnya seperti *cumulative causation*, *new economic geography* mempunyai prediksi sebaliknya atau bersifat situasional. Mazhab neoklasik dianggap mengabaikan hambatan fisik dan sosial dari mobilitas produksi serta adanya efisiensi karena aglomerasi (penghematan, baik yang bersifat internal maupun eksternal). Akibatnya yang terjadi adalah: *poor regions become poorer*, dan *riches become richer*. Studi oleh Firdaus dan Yusop (2009) untuk kasus bagaimana wilayah bagian Timur Indonesia dapat mengejar kemajuan ekonomi wilayah bagian Barat, menemukan selama pembangunan ekonomi pasca dimulainya industrialisasi, proses *catch-up* terjadi, namun dengan laju yang sangat pelan; hanya sebesar 0,29 persen. Ini berarti diperlukan sekitar 200 tahun agar wilayah Timur Indonesia dapat mengejar kemajuan wilayah Barat; bila dibiarkan secara alamiah.

Salah satu faktor yang dianggap dapat memutuskan lingkaran setan kesenjangan pembangunan antar wilayah adalah investasi. Data realisasi investasi, baik asing maupun domestik di Indonesia menunjukkan distribusi yang sangat timpang. Jawa dan Sumatera mendominasi perolehan realisasi investasi selama kurun waktu 1983-2003; semakin timpang di tahun 2004, dan mulai berkurang di tahun 2012. Terjadinya perubahan sebaran khususnya investasi

asing di tahun 2012 (ke Kalimantan dan Sulawesi), diperoleh terutama dari sektor pertambangan/energi, yang bersifat tidak terbarukan. Nilai tambah yang diperoleh dari kegiatan tersebut bisa jadi tidak men-*generate* kapasitas lokal, yang seyogianya menjadi tujuan pembangunan wilayah.

Tabel 1 Sebaran Realisasi Nilai Investasi Asing (PMA) dan Domestik (PMDN) di Indonesia (%)

Wilayah	1983-2003		2004		2012	
	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN
Sumatera	21,4	20,9	20,4	9,0	15,2	15,5
Jawa	61,6	51,9	68,3	55,5	55,6	57,2
Kalimantan	5,5	11,4	8,3	30,1	13,1	18,2
Sulawesi	3,4	7,4	0,5	0,6	6,1	5,3
Bali-Nusatenggara	3,1	2,5	2,4	1,4	4,6	3,4
Maluku-Papua	4,9	5,8	0,1	3,2	5,4	0,5
Total	100	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (2013)

Kondisi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia tentu tidak dibiarkan begitu saja oleh para pengambil kebijakan. Kebijakan otonomi daerah pada awal 2000-an, diikuti dengan desentralisasi fiskal, menjadi momentum yang diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan. Pada tahun 2011, SBY telah mencanangkan peta jalan 2011-2025 untuk perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI), yang diharapkan mempercepat tuntasnya masalah kesenjangan pembangunan antar wilayah. Makalah ini membahas tentang bagaimana fenomena ketimpangan pembangunan wilayah di Indonesia, serta apa saja strategi inisiatif untuk menyempurnakan berbagai program pemerintah.

2. Landasan Pemikiran

2.1 Makna Pembangunan Wilayah untuk Negara Berkembang

Dalam ilmu ekonomi, pembangunan wilayah (tingkat meso), dibicarakan secara panjang lebar dalam bidang ekonomi regional. Dari berbagai pendapat, dapat diringkaskan ekonomi regional adalah bidang ilmu yang mempelajari perekonomian suatu wilayah yang lebih kecil dari negara dengan menggunakan landasan ilmu antara lain: mikroekonomi, makroekonomi dan perdagangan internasional. Pasca 1990-an setelah Paul Krugman dan Michael Porter banyak mempublikasikan artikel tentang daya saing, ilmu ekonomi regional semakin kuat landasannya dalam mengawinkan antara *space* dan *economy*. Beberapa pakar membedakan dengan sangat jelas antara *urban* dan *regional economics* (Armstrong dan Taylor, 2000; Mc Cann, 2001; Capello, 2007). *Urban economics* lebih cenderung mempelajari ekonomi dalam kesatuan kota sebagai *single city*; sebaliknya ekonomi regional membahas ekonomi dalam area yang lebih luas dari sebuah kota, bahkan pada saat tertentu dapat bersifat lintas batas negara (contoh: kawasan industri penerbangan di Seattle; kawasan industri Sijori). Ekonomi regional selain membahas pilihan lokasi industri dan aglomerasi, juga mencakup keterkaitan pembangunan antar wilayah, khususnya perdesaan dengan perkotaan. Pasca pertengahan 1990-an, peran penting inovasi, infrastruktur dan jejaring banyak mewarnai tulisan/diskusi tentang daya saing suatu wilayah. Dengan demikian pengembangan keilmuan ekonomi regional sangat penting bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam bidang **pembangunan pertanian dan perdesaan**.

Hasil dari evolusi keilmuan ekonomi regional, fokus bergeser dari teori lokasi ke bagaimana wilayah dapat mengalokasikan sumberdaya dengan cara yang paling efisien. Secara ringkas, kerangka pembangunan wilayah adalah bagaimana proses pembangunan dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat meningkatkan kapasitas lokal. Meskipun perubahan kapasitas tersebut secara mudah dapat diukur dengan **pendapatan (produk domestik regional bruto/ PDRB) per kapita**, namun ukuran tersebut tidak dapat bersifat tunggal, karena mengandung beberapa kelemahan. Sehingga dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan wilayah, meningkatnya kapasitas lokal (baca: masyarakat setempat) hendaknya yang menjadi indikator utama, bukan hanya berapa besar nilai tambah proses produksi yang dihasilkan; yang bisa jadi mengalir ke pihak-pihak di luar wilayah itu sendiri. Peningkatan kapasitas lokal dapat diindikasikan antara lain menurunnya tingkat pengangguran, jumlah penduduk miskin serta indikasi peningkatan kualitas konsumsi masyarakat, baik konsumsi pangan, pendidikan dan kesehatan. Ukuran tersebut juga harus disertai dengan pemerataan, bukan terpusat pada beberapa orang atau golongan masyarakat saja.

2.2 Tesis Williamson dan Lingkaran Setan dalam Pembangunan Wilayah

Fenomena hubungan antara perkembangan ketimpangan antar wilayah dengan pembangunan ekonomi di suatu negara dikemukakan dengan baik oleh Williamson pada pertengahan 1960-an. Pada periode awal pembangunan, ekonomi terkonsentrasi di satu atau sedikit pusat pertumbuhan negara tersebut. Sejalan dengan meningkatnya ukuran pasar, pertumbuhan ekonomi menyebar ke

daerah-daerah lain yang menjadi pemasok sumberdaya. Hubungan ini diilustrasikan oleh kurva dengan bentuk huruf U terbalik (Williamson, 1965).

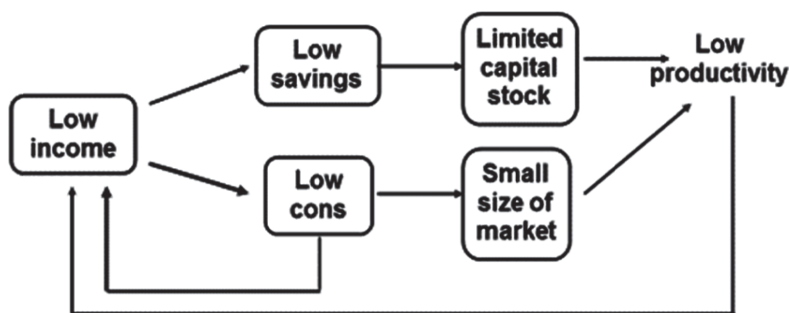
Menurunnya ketimpangan antar wilayah di tahap lebih lanjut didukung beberapa faktor seperti:

1. Peningkatan permintaan tenaga kerja di daerah yang kurang berkembang (upah lebih rendah).
2. Semakin berkurangnya daya tarik pusat pertumbuhan awal untuk aktivitas produksi (investasi) akibat kejenuhan pasar dan *congestion*.
3. Perkembangan infrastruktur sebagai wujud keberpihakan pengambil kebijakan terhadap pembangunan di wilayah yang kurang berkembang.

Bila beberapa faktor di atas tidak terpenuhi, bisa jadi ketimpangan antar wilayah terus melebar. Untuk kasus di Indonesia dimana pertumbuhan ekonomi bertumpu pada permintaan domestik (Bank Indonesia, 2012; Oberman *et al.* 2012), aktivitas ekonomi akan terus mengejar pasar yang besar. Dalam pengalokasian sumberdaya, akhirnya yang sering menjadi basis pertimbangan seberapa dekat produk ke konsumen (contoh: pengembangan hilirisasi produk perkebunan seperti kelapa sawit dan tebu di Jawa). Ini mengakibatkan keberpihakan pemerintah terhadap wilayah yang kurang berkembang masih belum begitu terasa.

Wilayah yang kurang berkembang dapat terperangkap dalam jebakan lingkaran setan (*vicious circle of regional underdevelopment*). Masyarakat di wilayah yang kurang berkembang memiliki pendapatan

yang rendah, berakibat dayabeli dan tingkat tabungan yang rendah. Masing-masing akan menyebabkan terbatasnya cadangan modal dan ukuran pasar yang kecil, berakibat rendahnya produktivitas di wilayah tersebut. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat dan seterusnya.



Sumber: Capello, 2007

Gambar 1 Lingkaran setan dalam pembangunan wilayah

2.3 Teori Konvergensi Pembangunan dan Metode Ekonometrika Data Panel

Secara teoretis, prediksi terhadap keberhasilan wilayah yang kurang berkembang mengejar kemajuan ekonomi wilayah lainnya telah menjadi batu loncatan perkembangan ilmu ekonomi regional. Bila wilayah yang kurang maju berhasil mengejar ketertinggalannya terhadap wilayah yang lebih dulu berkembang dikatakan terjadi proses konvergensi. Sebaliknya bila wilayah yang kurang berkembang semakin tertinggal dari wilayah yang lebih dulu maju, terjadi divergensi. Sejak pertengahan tahun 1950-an sampai awal 1990-an, berkembang berbagai aliran pemikiran tentang prediksi konvergensi/divergensi, sebagaimana tertuang pada Tabel 2, yang

disusun secara berurut dimulai dengan prediksi Neoklasik yang dimotori oleh Robert Solow.

Tabel 2 Ringkasan Teori Terkait dengan Prediksi Konvergensi/ Divergensi

Teori	Prediksi Proses Konvergensi atau Divergensi	Tokoh
Neoklasik	Konvergensi	Solow
<i>Cumulative causation</i>	Divergensi	Myrdal, Kaldor
Pertumbuhan <i>endogenous</i>	Konvergensi/divergensi tergantung pada modal fisik/SDM	Romer, Lucas
<i>New economic geography</i>	Konvergensi/divergensi tergantung pada ekspektasi ke belakang dan ke depan	Krugman

Secara empirik pengukuran terhadap proses konvergensi dilakukan awalnya pada sekelompok negara, negara bagian dan provinsi yang memiliki kemajuan ekonomi tidak terlalu berbeda; seperti yang dilakukan oleh Baumol (1986); Dowrick and Nguyen (1989); Barro (1991), Barro dan Martin (1991); Barro et al. (1992) dan Martin (1996) untuk kasus negara OECD, antar negara bagian di AS dan antar provinsi di Canada. Teknik pengukuran yang digunakan mengikuti perkembangan metode estimasi ekonometrika. Pada periode tersebut para penulis umumnya menggunakan regresi dengan data kerat lintang. Untuk kasus provinsi di Indonesia, pengukuran dengan teknik ini digunakan oleh Garcia dan Soelistinaingsih (1998). Melewati pertengahan 1990-an, pengukuran banyak dilakukan dengan data deret waktu seperti oleh Bernard and Durlauf (1995); St Aubyn (1999).

Mulai awal 2000-an sampai saat ini pengukuran konvergensi antar wilayah dalam negara banyak menggunakan model data panel, antara lain oleh Yudong dan Weeks (2000); Azzoni (2000); Badinger (2002); Gezici dan Hewings (2004) serta Firdaus dan Yusop (2009). Sesuai dengan perkembangannya, pendekatan yang awalnya menggunakan data panel statik dianggap tidak lagi valid, karena proses konvergensi yang bersifat dinamik. Periode 2000-an ditandai dengan berkembangnya metode data panel dan *spatial econometrics* dalam studi ekonomi regional. Dalam membandingkan kemajuan ekonomi antar wilayah, studi-studi tersebut menggunakan ukuran capaian produktivitas. Indikator ini lazimnya didekati dengan berapa nilai produksi per tenaga kerja atau penduduk; dikenal dengan PDRB per kapita. Ukuran lain yang juga dapat merepresentasikan ekonomi wilayah adalah konsumsi per kapita dan pendapatan rumah tangga (Li dan Xu, 2008). Kedua ukuran terakhir dianggap lebih mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Indikator lain seperti tingkat pengangguran dan kemiskinan hendaknya sangat dipertimbangkan dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan wilayah.

3. Fakta Empirik Ketimpangan Pembangunan Wilayah Indonesia

3.1 Ketimpangan antar Wilayah dari Berbagai Indikator Kemajuan Ekonomi

Tabel 3 berisi kompilasi perkembangan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia dengan menggunakan berbagai indikator kemajuan ekonomi. Nilai CV sepuluh indikator kemajuan ekonomi wilayah tahun 1996, 2004 dan 2011 ditampilkan; baik untuk perbandingan di setiap koridor ekonomi MP3EI² maupun nasional. Perbandingan tiga tahun tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi sebelum reformasi, periode awal desentralisasi fiskal dan kondisi terkini setelah beberapa tahun kebijakan desentralisasi fiskal berjalan.

²Bali, Nusatenggara (NT), Maluku dan Papua dalam tulisan ini digabung dalam satu koridor ekonomi. Beberapa studi ekonomi regional di Indonesia (Resosudarmo, 2009 dan Sakamoto, 2013) menggabungkan Bali dengan Jawa, sedangkan Nusatenggara digabung dengan Maluku dan Papua. Bila Bali digabung dengan Jawa, CV PDRB per kapita naik dari 0,52 dan 0,71 (saat NT-Maluku-Papua digabung dengan Bali) menjadi 0,57 dan 0,81 (analisis (2004 dan 2011 pada Tabel 2) . Dengan alasan ini maka lebih tepat Bali digabung dengan NT-Maluku-Papua, yang merupakan gabungan dua koridor ekonomi pada MP3EI.

Tabel 3 Ketimpangan antar wilayah indikator kemajuan ekonomi di setiap koridor ekonomi tahun 1996, 2004 dan 2011

Koridor	Indikator	CV		
		1996	2004	2011
Indonesia	PDRB per Kapita	0,97	0,98	0,94
	Pangsa Manufaktur terhadap PDRB	0,58	0,80	0,81
	Pangsa Pertambangan terhadap PDRB	1,58	1,36	1,34
	Produktivitas Pertanian	0,79	0,52	0,41
	Produktivitas Manufaktur	1,15	1,31	1,89
	Infrastruktur	0,54	0,49	0,44
	Penanaman Modal Asing	3,31	2,85	1,18
	Kemiskinan	0,45	0,51	0,55
	Pengangguran	0,43	0,34	0,46
	Indeks Pembangunan Manusia	0,05	0,05	0,04
Sumatera	PDRB per Kapita	0,62	0,65	0,57
	Pangsa Manufaktur terhadap PDRB	0,43	0,69	0,73
	Pangsa Pertambangan terhadap PDRB	1,30	1,06	1,19
	Produktivitas Pertanian	0,32	0,46	0,38
	Produktivitas Manufaktur	0,71	0,63	1,81
	Infrastruktur	0,39	0,46	0,25
	Penanaman Modal Asing	1,64	1,58	1,05
	Kemiskinan	0,22	0,39	0,44
	Pengangguran	0,25	0,28	0,31
	Indeks Pembangunan Manusia	0,02	0,02	0,02
Jawa	PDRB per Kapita	0,89	1,06	1,12
	Pangsa Manufaktur terhadap PDRB	0,34	0,49	0,50
	Pangsa Pertambangan terhadap PDRB	0,95	0,98	0,84
	Produktivitas Pertanian	0,14	0,45	0,19
	Produktivitas Manufaktur	0,42	0,58	0,68
	Infrastruktur	0,08	0,12	0,50
	Penanaman Modal Asing	1,24	1,12	0,98
	Kemiskinan	0,44	0,52	0,46
	Pengangguran	0,46	0,38	0,48
	Indeks Pembangunan Manusia	0,06	0,05	0,04

Tabel 3 Ketimpangan antar wilayah indikator kemajuan ekonomi di setiap koridor ekonomi (Lanjutan)

Koridor	Indikator	CV		
		1996	2004	2011
Kalimantan	PDRB per Kapita	0,78	1,05	0,93
	Pangsa Manufaktur terhadap PDRB	0,42	0,62	0,53
	Pangsa Pertambangan terhadap PDRB	1,21	1,06	0,91
	Produktivitas Pertanian	0,51	0,59	0,42
	Produktivitas Manufaktur	1,15	1,29	1,25
	Infrastruktur	0,54	0,39	0,40
	Penanaman Modal Asing	1,83	1,99	0,54
	Kemiskinan	0,38	0,24	0,18
	Pengangguran	0,51	0,28	0,59
	Indeks Pembangunan Manusia	0,06	0,05	0,05
Sulawesi	PDRB per Kapita	0,32	0,32	0,32
	Pangsa Manufaktur terhadap PDRB	0,28	0,30	0,28
	Pangsa Pertambangan terhadap PDRB	0,26	0,91	0,64
	Produktivitas Pertanian	0,24	0,28	0,26
	Produktivitas Manufaktur	0,42	0,65	0,47
	Infrastruktur	0,60	0,63	0,34
	Penanaman Modal Asing	1,15	1,88	1,40
	Kemiskinan	0,45	0,38	0,35
	Pengangguran	0,52	0,28	0,42
	Indeks Pembangunan Manusia	0,04	0,05	0,03
NT-Maluku-Papua	PDRB per Kapita	0,63	0,52	0,71
	Pangsa Manufaktur terhadap PDRB	0,85	0,74	1,26
	Pangsa Pertambangan terhadap PDRB	1,74	1,27	1,65
	Produktivitas Pertanian	0,28	0,46	0,57
	Produktivitas Manufaktur	1,00	1,46	2,13
	Infrastruktur	0,51	0,60	0,54
	Penanaman Modal Asing	2,23	1,27	1,05
	Kemiskinan	0,43	0,48	0,51
	Pengangguran	0,27	0,35	0,47
	Indeks Pembangunan Manusia	0,09	0,06	0,04

Berbagai indikator ketimpangan ekonomi pada Tabel 3 menunjukkan beberapa indikasi. Pertama, tingkat ketimpangan antar wilayah tidak dapat dilihat secara agregat/nasional saja. Derajat ketimpangan antar provinsi di dalam koridor ekonomi berbeda-beda. Ketimpangan PDRB per kapita tertinggi di Pulau Jawa, berikutnya di Kalimantan. Sulawesi memiliki ketimpangan PDRB per kapita yang rendah. Tingginya CV PDRB per kapita di Jawa dan Kalimantan mengindikasikan pembangunan lebih terkonsentrasi di beberapa wilayah saja, terutama di DKI Jakarta dan Kalimantan Timur. Untuk Sulawesi, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB masih tinggi, yaitu rata-rata 31,2 persen tahun 2011; sedangkan kontribusi industri pengolahan masih rendah yaitu rata-rata 8,8 persen pada tahun yang sama. Hal ini diduga menjadi penyebab relatif meratanya PDRB per kapita antar provinsi di pulau tersebut. Bila dilihat perkembangan antar tahun, ketimpangan PDRB per kapita terutama di Jawa semakin parah. Untuk antar provinsi di Kalimantan, ketimpangan PDRB per kapita meningkat dari tahun 1996 ke 2004 lalu turun pada tahun 2011.

PDRB per kapita sering menjadi target utama pembangunan nasional atau wilayah. Padahal ukuran ini masih mengandung kelemahan dalam menggambarkan distribusi pendapatan atau kesejahteraan masyarakat lokal. Analisis korelasi PDRB per kapita dengan sembilan indikator, secara konsisten pada tahun 1996, 2004 dan 2011, menunjukkan hanya **dua indikator** yang berkorelasi kuat dengan PDRB per kapita, yaitu produktivitas pertanian ($> 0,9$) dan penanaman modal asing ($> 0,5$). Koefisien korelasi PDRB per kapita dengan indikator infrastruktur mendekati 0,5. Artinya memang tidak secara otomatis jika ada peningkatan PDRB per kapita berarti

pengangguran dan kemiskinan turun atau IPM membaik. Untuk itu perlu dilihat pula bagaimana keparahan ketimpangan antar wilayah dari indikator selain PDRB per kapita.

Perkembangan ekonomi suatu wilayah juga dapat dilihat dari tren pangsa sektor industri pengolahan (manufaktur) terhadap total produksi barang dan jasa. Dari tahun 1996 ke 2011 ketimpangan antar wilayah dari indikator ini cenderung meningkat, baik di tingkat nasional, dan terutama di Sumatera dan Bali-NT-Maluku-Papua. Untuk Jawa, pangsa industri relatif lebih merata antar provinsi karena lokasi industri pengolahan yang menyebar ke berbagai provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur), yang rata-rata pada tahun 2011 sudah mencapai hampir 30 persen; diikuti Sumatera sekitar 17 persen dan pulau-pulau lain kurang dari 12 persen. Peningkatan ketimpangan dari pangsa sektor manufaktur menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah di Indonesia memasuki fase menuju titik maksimum dari kurva U Wiliamson. Hal ini hendaknya menjadi perhatian serius dari pemerintah, karena pada rencana pembangunan yang tertuang dalam dokumen MP3EI, pengembangan industri pengolahan terutama industri yang terkait dengan teknologi tinggi (*high-tech industry*) hanya difokuskan di Pulau Jawa. Pengalaman China membangun daerah yang saat ini menjadi pemasok komponen komputer dan elektronik terbesar di dunia yaitu Dongguan patut ditiru. Pada tahun 1978 tempat itu merupakan desa pertanian hingga terus beraglomerasi hingga saat ini menjadi kota metropolitan industri, dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa.

Ketimpangan ekonomi antar wilayah di suatu negara biasanya disebabkan faktor sumberdaya alam, seperti minyak, gas, batubara

dan bahan logam mulia. Dari indikator pangsa pertambangan terhadap total produksi barang dan jasa, ketimpangan secara umum menurun dari tahun 1996 ke 2011 baik di nasional maupun setiap koridor. Beberapa provinsi di Sumatera dan Kalimantan melakukan eksplorasi baru bahan tambang seperti emas dan batubara. Di Kalimantan rata-rata pangsa sektor ini pada PDRB mencapai hampir 20 persen (catatan: di Kalimantan Barat hanya 1,8% pada tahun 2011). Nilai CV indikator ini meskipun demikian tetap tinggi yaitu sebesar 1,34 untuk nasional pada tahun 2011. Hal ini berkontribusi pada masih tingginya ketimpangan ekonomi antar wilayah sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Produktivitas pertanian dan manufaktur, yang dalam hal ini didefinisikan sebagai rasio nilai output terhadap jumlah pekerja, menunjukkan perbedaan fenomena di setiap koridor dan tahun. Ketimpangan produktivitas pertanian relatif berfluktuasi, meskipun ada kecenderungan menurun dari tahun 1996 ke 2011. Dari nilai CV, ketimpangan relatif rendah terutama di Sulawesi, Jawa dan Sumatera. Untuk produktivitas manufaktur, ketimpangan antar wilayah terus meningkat secara signifikan, yang mengindikasikan fenomena yang sama dengan ketimpangan pangsa industri. Dalam hal ini manufaktur juga mencakup industri pengolahan hasil tambang, sehingga ketimpangan tinggi terjadi di koridor Bali-NT-Maluku-Papua. Beberapa provinsi seperti Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur memiliki produktivitas manufaktur masing-masing sepuluh dan lima kali rata-rata nasional. Bila industri pengolahan bahan tambang dikeluarkan, Jawa Barat dan Banten adalah dua provinsi dapat dikatakan paling “industrious”. Sebaliknya di Sulawesi ketimpangan kedua indikator ini relatif rendah. Ini disebabkan

masih rendahnya produktivitas baik pertanian maupun manufaktur secara relatif terhadap provinsi di pulau-pulau lainnya.

Tidak meratanya pembangunan infrastruktur sering dihipotesiskan dalam berbagai studi sebagai penyebab ketimpangan ekonomi antar wilayah selain sumberdaya alam. Ketimpangan pembangunan infrastruktur mempunyai tren yang berbeda antar koridor. Di Jawa ketimpangan meskipun relatif rendah, namun cenderung meningkat dari tahun 1996 ke 2011. Wilayah lainnya menunjukkan fenomena ketimpangan infrastruktur justru menurun. Terkait dengan peran penyediaan infrastruktur, ketimpangan dari aspek penanaman modal asing menunjukkan tren yang menurun secara konsisten dan signifikan baik di nasional maupun setiap koridor. Meskipun banyak yang memandang ketergantungan terhadap penanaman modal asing bukan hal yang baik, namun perkembangan ekonomi Indonesia menunjukkan pengalaman ketergantungan yang besar pada investasi asing. Studi Firdaus dan Yusop (2009) membuktikan hal ini, yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Indikasi ketimpangan antar wilayah dari ketiga indikator terakhir merupakan ukuran yang seharusnya juga menjadi target utama pembangunan nasional. Ketimpangan kemiskinan, yang didefinisikan sebagai rasio jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk menunjukkan tren yang berbeda di tingkat nasional dengan koridor. Ketimpangan kemiskinan meningkat secara keseluruhan, terutama di Sumatera, Jawa dan Bali-NT-Maluku-Papua; namun menurun di Kalimantan dan Sulawesi. Hal ini tidak sejalan dengan tren ketimpangan PDRB per kapita. Demikian pula dengan tingkat pengangguran terbuka, dapat dikatakan tren ketimpangan yang terjadi sama dengan kemiskinan.

Untuk IPM, dari tahun 1996 ke 2011 cenderung terjadi penurunan tingkat ketimpangan baik di tingkat nasional maupun di setiap koridor. Di Sumatera, ketimpangan IPM sangat rendah. Nilai IPM di Sumatera secara rata-rata lebih tinggi 0,01 poin daripada provinsi di Jawa (termasuk DKI Jakarta). Rendahnya tingkat ketimpangan IPM ini terutama karena membaiknya perkembangan pendidikan (partisipasi angka sekolah). Nilai CV untuk penduduk yang sekolah pada usia 19-24 tahun di tahun 2011 secara nasional sebesar 0,39. Rata-rata angka partisipasi terendah di Kalimantan, namun persentasenya tersebar hampir merata antar provinsi. Untuk Jawa, Sulawesi dan Bali-NT-Maluku-Papua rata-rata angka partisipasi relatif tinggi dibandingkan Sumatera. Di Sumatera beberapa provinsi seperti Bangka Belitung dan Kepulauan Riau persentase penduduk yang sekolah pada usia 19-24 tahun hanya sekitar 8 persen, jauh berbeda dengan penduduk DI Yogyakarta yang lebih dari 41 persen penduduk usia 19-24 tahun bersekolah; yang bisa jadi karena besarnya jumlah pendaatang yang kuliah di daerah ini.

3.2 Pembangunan Ekonomi Wilayah di Indonesia: Kovergensi atau Divergensi?

Dasar pengambilan kebijakan yang baik adalah pengetahuan yang akurat (*knowledge-based*), yang lazimnya berangkat dari kesimpulan studi yang sah. Sejalan dengan berkembangnya teknik estimasi dalam ekonometrika pasca 1990-an, akurasi dalam pendugaan seberapa cepat wilayah-wilayah kurang berkembang mengejar kemajuan wilayah lainnya semakin diperbaiki. Studi empirik yang dilakukan Firdaus dan Yusop (2009), Firdaus (2010) serta Firdaus *et al.* (2012), menunjukkan ketidaktepatan dalam pilihan pendekatan

estimasi, akan dapat berakibat fatal dalam pengambilan kesimpulan tentang proses pembangunan wilayah. Perbedaan konstruk yang diajukan sebagai ukuran ketimpangan juga akan memberikan kesimpulan yang berbeda.

Berdasarkan data empirik wilayah di Indonesia selama kurun waktu 1983-2003, dilakukan pengukuran untuk mengetahui apakah kemajuan ekonomi wilayah yang kurang berkembang di Indonesia *catch up* terhadap wilayah yang lebih maju; bila iya, berapa lama proses itu akan terjadi? Untuk menjawab persoalan ini model ekonometrika dapat digunakan. Karena menggunakan data panel beberapa hal harus dipertimbangkan³. Bila pengambil kebijakan mendasarkan kesimpulan pada pendekatan estimasi yang sangat awam, seperti *ordinary least squares* (OLS), akan diperoleh kesimpulan bahwa proses *catch up* tidak terjadi sama sekali (Tabel 3). Jika pendekatan estimasi diperbaiki dengan teknik yang lebih belakangan berkembang, seperti *fixed-effects* dan *random-effects model* (dua teknik ini yang lazimnya dikuasai oleh peneliti di Indonesia), akan diperoleh kesimpulan yang sebenarnya lebih bias (Arellano, 1993; Bond, 1998 dan 2001). Dalam perkembangan ekonometrika data panel sejak akhir 1990-an, diketahui bahwa kedua pendekatan ini menghasilkan parameter dugaan yang bersifat bias ke atas atau bias ke bawah (*upward or downward biased*), khususnya bila pendekatan tersebut digunakan pada model dinamik seperti pengamatan proses konvergensi/divergensi ekonomi antar wilayah.

3 Untuk mengestimasi kecepatan konvergensi, Firdaus dan Yusop (2009) serta Firdaus *et al.* (2012) menggunakan persamaan: $\ln y_{it} = \gamma \ln y_{i,t-1} + \beta_1 \ln s_{i,t} + \beta_2 \ln(n + g + \delta)_{i,t} + v_{i,t}$ Model ini dikenal dengan model dinamik panel yang lazim digunakan dalam studi ilmu ekonomi regional sejak tahun 2000-an.

Tabel 4 menyediakan informasi parameter dugaan koefisien regresi model data panel dinamik. Hasil tersebut dapat digunakan untuk menyimpulkan apakah wilayah yang kurang maju ekonominya *catch up* terhadap wilayah yang lebih dulu berkembang, sekaligus untuk menghitung berapa lama proses tersebut terjadi (*speed of convergence*). Lima teknik estimasi yang berbeda memberikan hasil yang berbeda-beda. Nilai-nilai estimasi tersebut dapat dilihat sebagai suatu kontinum yang dimulai dengan pendugaan dari ***fixed-effects model sebagai ujung kiri dan OLS di ujung kanan***. Di antara keduanya terdapat estimator yang memenuhi kriteria tidak bias, sah dan efisien. Estimator yang digunakan adalah yang dihitung dengan teknik *generalized method of moments* (GMM). Baik teknik *first-difference* (FD-GMM) maupun *system* (Sys-GMM), keduanya digunakan lalu dievaluasi mana yang menjadi estimator terbaik. Estimator OLS memberikan kesimpulan proses *catch up* tidak terjadi. Teknik *fixed* dan *random-effects model* menunjukkan proses *catch up* berlangsung cepat (kurang dari 20 tahun).

Tabel 4 Nilai Parameter Dugaan Koefisien Regresi untuk Model Konvergensi

Estimator	Pendekatan Estimasi				
	OLS	Fixed	Random	FD-GMM	Sys-GMM
γ	1,0006	0,8817	0,9619	0,5696	0,9971
β_1	0,0112	0,0125	0,0055	- 0,1741	0,0327
β_2	0,0049	- 0,0626	0,0105	0,4812	- 0,0200
Implied λ	NA	12,59	62,25	56,28	0,29
Sargan-stat (P-value)				0,0013	0,0983

Perhitungan dengan Sys-GMM yang dianggap sebagai estimator terbaik, ternyata menunjukkan nilai koefisien γ yang merupakan penentu kesimpulan berada di bawah satu (Tabel 3). Dari koefisien tersebut diperoleh nilai *implied* λ yang merupakan kecepatan proses konvergensi, yaitu 0,29 persen. Nilai ini mengisyaratkan bahwa proses *catch up* akan terjadi, namun dalam periode yang sangat lama yaitu sekitar 200 tahun. Ini berimplikasi, bila dibiarkan secara alamiah, maka ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia akan terus terjadi dalam periode yang sangat lama. Diperlukan suatu *trigger* sehingga proses *catch up* tersebut dapat lebih cepat. Kesimpulan yang berbeda akan diperoleh estimator yang dipilih adalah empat yang lainnya. Estimasi persamaan di atas juga menunjukkan investasi yang berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi wilayah (koefisien β_1 , nilainya positif pada hasil estimasi Sys-GMM).

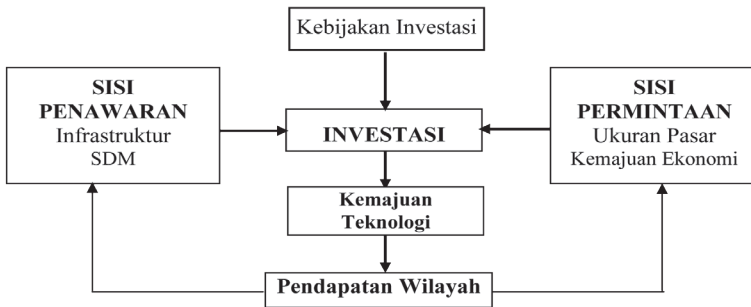
Studi konvergensi antar kabupaten/kota di Pulau Jawa juga dilakukan oleh Firdaus et al. (2012), dengan membandingkan keparahan ketimpangan antar wilayah dengan menggunakan dua jenis data, yaitu PDRB dan pengeluaran rumahtangga. Ketimpangan PDRB antar kabupaten/kota di Jawa (DKI Jakarta dikeluarkan) ternyata tinggi, yang diindikasikan oleh nilai CV sebesar 0,95 pada tahun 2009. Bila menggunakan data pengeluaran rumahtangga, nilai CV pada tahun yang sama diperoleh jauh lebih rendah yaitu 0,37. Nilai CV juga bervariasi antar provinsi di Pulau Jawa. Provinsi Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur memiliki CV PDRB dan pengeluaran rumahtangga yang lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Dari hasil pengujian dengan regresi, diketahui perbedaan keparahan ketimpangan antar wilayah tersebut

dipengaruhi terutama oleh perbedaan kualitas infrastruktur (listrik, air dan jalan) serta kemajuan ekonomi kabupaten/kota itu sendiri.

Aplikasi model data panel dinamik untuk mengamati proses konvergensi menunjukkan hasil estimasi koefisien *lag* pada PDRB sebesar 1,27; yang berarti proses konvergensi tidak terjadi antar wilayah kabupaten/kota di Pulau Jawa. Jika menggunakan data pengeluaran rumah tangga, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,34, yang menunjukkan proses konvergensi antar wilayah terjadi secara cepat. Perbedaan kesimpulan dengan menggunakan indikator yang berbeda ini mengindikasikan antara lain bahwa aktivitas produksi di daerah-daerah di Jawa nilai tambahnya tidak kembali ke masyarakat lokal, melainkan dikirim ke luar daerah seperti Jakarta bahkan luar negeri (perusahaan milik asing).

3.3 Ketimpangan Investasi antar Wilayah di Indonesia

Dalam pembangunan wilayah, investasi penting untuk meningkatkan ketersediaan cadangan modal. Investasi asing dipandang signifikan karena akan memfasilitasi terjadinya transfer teknologi. Tinggi rendahnya investasi di suatu wilayah dipengaruhi selain kebijakan yang ada, juga beberapa faktor baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Ini dikenal dengan kerangka OLI (*ownership, location and internallly*), yang dikemukakan oleh Dunning (1981).



Gambar 2. Determinan Investasi dan Kaitannya dengan Pembangunan Wilayah

Bila dirumuskan secara empirik untuk kasus Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi dari sisi suplai adalah infrastruktur dan kualitas sumberdaya manusia (pendidikan). Dari sisi permintaan, ukuran pasar (PDRB) dan tingkat kemajuan ekonomi suatu wilayah (pangsa pertanian terhadap PDRB dan keterbukaan perdagangan) akan mempengaruhi arus investasi yang masuk. Masing-masing faktor tersebut sudah diamati secara terpisah dalam berbagai studi di negara lain seperti oleh Kumar and Chadee (2002), Cheng dan Kwan (2000), Demurger (2001), Globerman (2002) dan Guimaraes (2000). Untuk membuktikan hal ini dilakukan pengujian dengan menggunakan model data panel dinamik seperti pada kasus konvergensi, untuk keseluruhan faktor secara simultan. Hasil estimasi dengan Sys-GMM menunjukkan koefisien *lag* dari variabel dependen yang tidak bias karena berada di antara estimator OLS dan *fixed-effects model*. Bila diurutkan berdasarkan besarnya pengaruh berbagai faktor terhadap arus investasi ke suatu wilayah, diperoleh hasil secara dari yang terbesar: (1) ukuran pasar; (2) tingkat kemajuan ekonomi; (3) infrastruktur dan (4) kualitas

SDM. Kebijakan investasi juga berpengaruh, tapi dalam model ini merupakan variabel *dummy*. Temuan ini bermakna antara lain investasi akan cenderung datang ke wilayah-wilayah yang sudah lebih dulu maju, dengan infrastruktur yang baik dan kualitas SDM yang memadai. Dengan temuan dari studi konvergensi bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, maka bila dibiarkan saja secara alamiah, kemajuan ekonomi beberapa wilayah di Indonesia akan terus meninggalkan wilayah-wilayah lain kurang berkembang. Akibatnya, ketimpangan antar wilayah terus terjadi, bahkan cenderung melebar.

Pemerintah mencanangkan MP3EI pada tahun 2011. Program ini membagi wilayah Indonesia menjadi enam koridor ekonomi. Setiap koridor memiliki basis sektor/komoditas pengembangan, mencakup pertambangan/energi, pertanian termasuk perkebunan, industri pengolahan serta jasa pariwisata. Dengan basis keunggulan komparatif wilayah, diharapkan terjadi konektivitas antar koridor yang akan mendorong investasi sehingga dapat mempercepat laju pembangunan ekonomi di masing-masing koridor itu sendiri. Dari sisi upaya peningkatan konektivitas, program MP3EI dapat dianggap ide yang brilian. Beberapa kelemahan patut menjadi masukan dalam pelaksanaan program ini ke depan.

Ukuran keberhasilan program MP3EI terbatas pada peningkatan PDB/PDRB yang belum tentu mencerminkan kesejahteraan masyarakat lokal. Sasaran utama program MP3EI adalah menaikkan PDB per kapita Indonesia 5 kali lipat dari tahun 2011 ke 2025. Bisa jadi ini tercapai karena rataan PDRB provinsi di Jawa dan luar Jawa. Keberpihakan program untuk wilayah yang kurang maju masih dipertanyakan. Indikasi alokasi investasi masih besar untuk wilayah

Barat. Data dari Strategic Asia (2012) menunjukkan nilai investasi proyek di Jawa dan Sumatera sekitar Rp 234 Triliun, lebih dari dua kali nilai investasi proyek di dua koridor yang paling tertinggal (Bali-NT serta Maluku-Papua). Sektor ekonomi yang dikembangkan di luar Jawa adalah sektor primer, yang menyebabkan wilayah-wilayah di zona tersebut terus berada pada tahap *specialization* atau menuju *transformation*; tidak beranjak maju ke tahap *diversification* (hilirisasi dengan berbagai produk turunan industri pengolahan). Penting pula dipertimbangkan, ketimpangan antar wilayah **di dalam** masing-masing koridor ekonomi; yang kurang mendapat perhatian dalam MP3EI. Dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi persoalan ketimpangan ekonomi antar wilayah, MP3EI bukan jawaban.

4. Strategi Inisiatif

4.1 Pengalaman Negara Lain dan Pengelolaan Dana Perimbangan

Negara lain seperti halnya Indonesia juga menghadapi masalah ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah. Sebagai contoh Thailand mempunyai permasalahan kawasan Barat yang lebih tertinggal daripada kawasan timurnya, terutama Bangkok dengan kota lain. Badan Penanaman Modal Thailand menetapkan kebijakan insentif untuk sektor-sektor yang bersifat mengembangkan teknologi baru di wilayah yang kurang berkembang. Insentif mencakup pembebasan pajak pertambahan nilai, pajak impor barang modal serta hak penggunaan lahan yang lebih lama.

Di China, pertumbuhan ekonomi kawasan timur yang merupakan daerah pantai (*coastal*) lebih cepat daripada daerah kawasan tengah dan barat yang merupakan daratan (*inland*). Rendahnya investasi di kawasan barat telah diidentifikasi sebagai penyebab utama, terutama sejak kebijakan Pemerintah Deng membuat *special economic zone* di kawasan pantai pada tahun 1980-an (Zheng, 2007). Sejak tahun 1998, Pemerintah Zhu Rongji telah menetapkan kebijakan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan wilayah yang disebut Xibu da Kaifa atau “Go West”. Padahal saat itu rasio PDRB kawasan barat sekitar 43 persen kawasan timur. Strategi yang ditempuh adalah meningkatkan **investasi publik** secara besar-besaran di kawasan barat.

Selama lima tahun berjalan, proyek dari Pemerintah China terutama untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan senilai US \$ 120 miliar (sepuluh kali total nilai proyek MP3EI di tahun 2012 untuk koridor di kawasan timur Indonesia/KTI) telah ditanamkan di kawasan barat; terutama diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan industri pengolahan pertanian. Hasilnya pada tahun 2007 pertumbuhan baik investasi maupun ekonomi di kawasan barat (Hainan, Inner Mongolia, Guangxi, Sichuan and Jilin) lebih cepat dibandingkan Kawasan timur (Xinjiang, Shanghai, Beijing, Helongjiang and Guizhou). Memang dalam peta alur pembangunan wilayahnya, China menetapkan kawasan timur sebagai daerah industri, sedangkan daerah barat sebagai daerah pertanian. Untuk menjaga keseimbangan perkembangan ekonomi kedua kawasan tersebut, Pemerintah menetapkan kebijakan dana transfer dari daerah industri ke daerah pertanian. Hal seperti ini diharapkan juga bisa diwujudkan di Indonesia.

Di Indonesia kebijakan untuk mempercepat pembangunan di KTI sudah dimulai terutama sejak akhir Pemerintahan Suharto. Pada tahun 1996 dibuat Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), yang diikuti dengan ditetapkannya Menteri Negara untuk Percepatan Pembangunan KTI pada tahun 2000. Perlu diingat, isu yang berkembang dalam ketimpangan wilayah di Indonesia memang bukan KBI vs KTI karena di KBI juga ada yang kurang berkembang, demikian sebaliknya. Program KAPET mempunyai sasaran yang sudah baik, seperti halnya program di China. Ditetapkan di KTI, PDRB per kapita dan IPM harus mendekati rata-rata nasional; kontribusi investasi dan ekspor minimal 20 persen dari total nasional. Ada 12 KAPET yang dibuat di Kalimantan, Sulawesi, NT dan Papua. Disertasi Soenandar (2005) menyimpulkan 12 KAPET yang dibuat tersebut gagal dalam pencapaian sasaran yang ada.

Kebijakan lain yang ditempuh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ketimpangan antara wilayah adalah dana perimbangan. Kebijakan dana perimbangan, khususnya dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) di Indonesia selama ini malah lebih banyak diberikan kepada wilayah yang sudah maju. Hal ini disebabkan antara lain karena formula yang digunakan bias ke wilayah yang lebih banyak penduduknya (Pulau Jawa dan Sumatera). Tabel 5 menunjukkan proporsi alokasi dana perimbangan menurut pulau/koridor ekonomi pada tahun 2005 dan 2011, yang dibedakan menurut 4 kelompok dana perimbangan yaitu DAU, DAK, dana bagi hasil sumberdaya alam (D. SDA) dan dana bagi hasil pajak (D. pajak). Dari total dana perimbangan, pada tahun 2005 sekitar 63 persen dalam bentuk DAU, DAK sebesar 3 persen dan sisanya dana bagi hasil. Di tahun 2011, persentase

DAU dan DAK naik masing-masing menjadi sekitar 66 dan 7 persen. Terlihat alokasi DAU ke Jawa dan Sumatera yang sudah mendominasi alokasi malah meningkat dari tahun 2005 ke 2011, yaitu dari sekitar 56 menjadi hampir 60 persen. Untuk DAK, yang seyogianya lebih fleksibel untuk pemerataan pembangunan malah meningkat alokasinya di Pulau Jawa dari 17,8 pada tahun 2005 menjadi 27,4 persen pada tahun 2011. Dengan alokasi D. SDA yang sangat tinggi di dua pulau, yaitu Sumatera dan Kalimantan, mengindikasikan dana transfer yang terjadi justru dari luar ke Pulau Jawa, bukan sebaliknya. Padahal D. pajak di Jawa relatif sudah tinggi. Artinya meskipun perekonomian berkembang pesat di Jawa, namun karena penyebarannya di dalam Pulau Jawa sendiri tidak merata; maka perdesaan dan kawasan selatan Jawa yang hampir tidak tersentuh industri, masih perlu disubsidi besar.

Beberapa studi mengevaluasi beberapa titik lemah dari pelaksanaan kebijakan dana perimbangan di Indonesia. Mishra (2009) melihat kapasitas pemda menjadi permasalahan utama dalam pemanfaatan dana perimbangan. Contoh *special quasi judicial grants* dari India, dimana dana memang dialokasikan secara khusus untuk daerah yang lebih terbelakang dapat diambil. Studi Sakamoto (2013) dengan menggunakan simulasi *inter-regional computable general equilibrium* model menunjukkan, meskipun dana perimbangan dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah, namun dampak dana perimbangan pada peningkatan ekonomi wilayah, terutama ada kemandirian fiskal yang penting untuk jangka panjang, tidak besar. Fenomena *fly-paper effect* terjadi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan beberapa studi yang dilakukan oleh Sumedi (2013). Beberapa masukan penting untuk meningkatkan kinerja kebijakan

ini adalah bagaimana meningkatkan pemanfaatan dana, terutama DAK baik jumlah maupun ketepatan sarannya. Dapat dilakukan realokasi dari dana yang tersedia di Kementerian dan Lembaga ke DAK, terutama untuk meningkatkan investasi publik di kawasan kurang berkembang, seperti pengalaman China. Tentunya kapasitas Pemerintah Daerah menjadi kata kunci keberhasilan program.

Tabel 5 Proporsi Alokasi Dana Perimbangan Menurut Pulau dan Jenis (%)

Pulau/Koridor Ekonomi	Tahun	DAU	DAK	D. SDA	D. Pajak	Total
Sumatera	2005	24,8	27,6	52,9	22,5	29,3
	2011	26,8	25,2	45,4	23,4	29,0
Jawa	2005	39,3	17,8	2,6	50,1	34,1
	2011	32,9	27,4	4,5	48,9	30,2
Kalimantan	2005	9,7	16,5	39,6	12,0	15,5
	2011	9,5	8,9	43,3	12,0	14,8
Sulawesi	2005	11,8	16,8	0,6	5,8	9,0
	2011	12,8	15,0	0,7	5,9	10,3
Bali-NT-Maluku-Papua	2005	14,4	21,3	4,3	9,7	12,1
	2011	18,0	23,5	6,1	9,8	15,6
Total	2005	100	100	100	100	100
	2011	100	100	100	100	100

Sumber: Kementerian Keuangan, 2012

4.2 Strategi Inisiatif di Tingkat Mikro Perdesaan

Pada uraian sebelumnya telah disinggung bahwa pembangunan wilayah tidak boleh menjadikan hanya PDRB per kapita sebagai sasaran. Ukuran ini masih belum sepenuhnya sejalan dengan naiknya kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan oleh

turunnya kemiskinan atau pengangguran. Kedua indikator ini lebih sulit dicapai di kawasan perdesaan yang tidak tersentuh sektor manufaktur. Masukan terhadap MP3EI saat ini yang berkembang adalah penetapan sektor/komoditas unggulan di setiap koridor **tidak boleh** mengabaikan struktur ekonomi yang sudah berkembang di masyarakat. Sebagai contoh Pulau Jawa yang menjadi koridor untuk industri dan jasa, masih menopang lebih dari 60 persen kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Untuk daerah perdesaan di Jawa bila pembangunan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal, maka pengembangan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi adalah salah satu alternatif terbaik. Ini merupakan contoh *mismatch* antara kebijakan di aras makro/ meso dengan mikro.

Pembangunan pertanian dipercaya dapat berkontribusi meningkatkan pendapatan masyarakat (menurunkan kemiskinan). Strategi untuk mengembangkan komoditas pertanian dalam mendukung pembangunan wilayah dengan fokus komoditas dipelopori antara lain oleh Jepang dengan meluncurkan program *one village one product* (OVOP) pada tahun 1979 untuk Orta Perfection. Program ini dijalankan dengan berdasarkan tiga prinsip utama yaitu “*thinking globally while acting locally*”, *independence and creativity* dan *fostering human resources*” (Chimudu, 2007). Sukses program ini diikuti oleh beberapa negara tetangga dengan meluncurkan program serupa seperti di Thailand dengan program *one tambon one product* (OTOP) yang diluncurkan oleh PM Dr Shinawatra Thaksin pada tahun 2001 (Routray, 2007), utamanya untuk komoditas hortikultura. Di Malaysia, terinspirasi oleh program tersebut, diterapkan *one district one industry* (ODOI),

dengan fokus membangun jiwa kewirausahaan masyarakat perdesaan.

Di Indonesia, program pengembangan komoditas pertanian **berbasis wilayah** diadopsi dengan nama OVOP seperti di Jepang. Beberapa contoh penerapan program ini misalnya untuk pengembangan sayur-sayuran di Cianjur dan Boyolali, yang setelah dievaluasi disimpulkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan (Dipta, 2009). IPB sudah berhasil mengembangkan model *Agribusiness Development Center* (ADC). Model ini mampu menjembatani sektor hulu dengan pasar untuk komoditas hortikultura yang bernilai ekonomi tinggi. Pada tahun-tahun terakhir program ini lebih banyak di bawah kendali Kementerian Koperasi dan UKM. Bahkan Mennekop dan UKM, Suryadharma Ali sendiri mengatakan OVOP merupakan strategi untuk menghadapi krisis keuangan global, karena desa mempunyai potensi yang besar namun masih menjadi pusat kemiskinan dan pengangguran (Ali, 2008). Program OVOP yang diterapkan di atas merupakan suatu pendekatan yang baik, karena bila dilakukan akan dapat meningkatkan pencapaian *economies of scale*. Masih terdapat celah utama dari program ini, yaitu masalah pembiayaan untuk menjalankan program yang masih lebih banyak ditanggung oleh pemerintah. Dengan kondisi anggaran yang semakin ketat seperti saat ini, upaya *self-financing* hendaknya yang lebih diutamakan, sehingga pemerintah dapat lebih fokus dalam memanfaatkan anggaran, seperti untuk pembangunan infrastruktur. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa dalam pembiayaan pertanian sering dihadapi permasalahan koleteral. Selain itu dalam program ini masih dijalankan dengan basis lahan hamparan, yang semakin sulit dilakukan dengan ketersediaan lahan yang semakin menyempit.

Komoditas perkebunan dan tanaman pangan sudah lazim dibudidayakan di Indonesia pada hamparan yang luas. Komoditas hortikultura seperti buah mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan potensi pasar besar karena masih tingginya volume impor. Pengembangan buah untuk mendukung pembangunan wilayah dapat dilakukan, meskipun dilakukan secara terpecah di lahan-lahan sempit atau areal sekitar pemukiman. Walaupun terpecah dan masing-masing hanya berupa lahan sempit, tetapi bila dikompilasi jumlah lahan yang potensial untuk pengembangan tanaman buah menjadi sangat luas. Dengan kondisi lahan seperti ini muncul permasalahan lain yaitu terhambatnya realisasi pembiayaan melalui kredit program pertanian. Untuk mengatasi hal tersebut dapat ditempuh alternatif pengajuan kredit yang diajukan secara kelompok. Alternatif ini baru berjalan baik untuk komoditas tanaman pangan seperti padi dimana lahan milik kelompok terdapat dalam satu hamparan. Dalam model ini terdapat penjamin kredit atau analisis yang dapat dilakukan oleh pemasok buah/distributor.

Dengan ide di atas, permasalahan terbatasnya dana yang dimiliki petani untuk melakukan budidaya buah secara baik dapat diatasi. Karena *avalis* akan berkepentingan untuk mendapatkan produk dengan kualitas yang baik, yang tentunya dihasilkan dengan penerapan budidaya yang baik pula. Tanpa adanya pinjaman dana, maka para petani hanya dapat mengusahakan buah-buahan tanpa disertai teknik produksi dan penanganan pasca panen yang tepat. Teknik penanaman yang terkesan apa adanya ini hanya mampu menghasilkan buah dengan kualitas dan kuantitas yang rendah serta sebagian besar tidak sesuai dengan preferensi konsumen.

Oleh sebab itu, ketersediaan kredit pertanian berbasis tanaman adalah sangat diperlukan terutama untuk membantu petani kecil agar lebih akses terhadap sumber dana yang akan digunakan untuk pengeluaran biaya-biaya produksinya. Hasil akhir yang diharapkan dari model ini antara lain adalah memperkuat peran serta petani dalam menjalankan perekonomian daerah melalui sektor pertanian. Selain itu, peningkatan peran serta kelembagaan di tingkat petani diharapkan dapat menjadi suatu rangkaian manajemen rantai pasok yang kuat dan berperan penting dalam penyediaan komoditas hortikultura nasional dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan demikian akan diperoleh peningkatan suplai, sehingga secara ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya para petani tanaman buah. Melalui peningkatan pendapatan ini diharapkan tingkat kesejahteraan petani pun semakin meningkat sehingga dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan program beberapa faktor kunci harus dipertimbangkan, seperti ketersediaan bibit unggul untuk varietas yang seragam dan kemampuan rumahtangga/petani untuk menerapkan budidaya sesuai prosedur baku (SOP). Semua sepertinya sepakat, bahwa kita menghadapi masalah di sisi suplai (produktivitas), bukan di sisi *demand*. Jumlah penduduk yang besar, yang sering disebut sebagai bonus demografi, harus menjadi peluang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi yang mensejahterakan masyarakat lokal.

5. Penutup

Meskipun setiap negara dan wilayah di dalam negara menghadapi persoalan ketimpangan pembangunan antar wilayah, namun permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah yang dihadapi Indonesia semakin serius. Saat ini Indonesia menempati posisi terburuk dibandingkan dengan negara maju dan sesama negara sedang berkembang. Kebijakan yang dilakukan pemerintah masih belum sepenuhnya dapat menjawab permasalahan ini.

Dalam mengukur perkembangan ekonomi wilayah, peningkatan PDRB per kapita bukan satu-satunya sasaran yang harus dicapai. Terdapat banyak indikator kemajuan ekonomi wilayah yang harus dipertimbangkan, seperti produktivitas sektoral, kemiskinan, pengangguran dan IPM. PDRB per kapita ternyata tidak berkorelasi kuat dengan ukuran-ukuran tersebut. Ukuran **ketimpangan** (baik wilayah maupun rumah tangga) harus menjadi indikator dan asumsi dalam menetapkan sasaran pembangunan.

Ada dua terobosan terkait pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam dekade terakhir. Pertama, mekanisme dana perimbangan. Karena alokasi dana mempertimbangkan distribusi jumlah penduduk (miskin), maka Pulau Jawa yang sudah lebih maju mendapatkan alokasi dana yang lebih besar. Transfer ke daerah yang kurang berkembang, terutama dari Dana Alokasi Khusus perlu ditingkatkan secara signifikan. Kedua, MP3EI hendaknya memperhatikan tidak saja struktur ekonomi masing-masing koridor, tetapi juga ketimpangan wilayah di dalam setiap koridor. Sama pula, MP3EI masih belum merupakan jawaban sepenuhnya terhadap persoalan ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Untuk

itu masih perlu dipikirkan insentif dan keberpihakan lebih nyata untuk daerah kurang berkembang, terutama Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat makro, meso dan mikro. Pembangunan pertanian merupakan salah satu jawaban untuk meningkatkan kapasitas lokal. Keberpihakan, terutama alokasi dari dana perimbangan untuk wilayah yang kurang berkembang perlu diarahkan prioritasnya untuk sektor pertanian.

Daftar Pustaka

- Akita, T., A. Alisjahbana, Regional Income Inequality in Indonesia and the Initial Impact of the Economic Crisis, *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 38, 201-22, 2002.
- Ali, S., Program OVOP Hadapi Krisis Keuangan Global, *Madina* edisi 8-14 Desember 2008.
- Arellano, M., On the Testing of Correlated Effects with Panel Data, *Journal of Econometrics* 59, 87-97, 1993.
- Armstrong, H., J. Taylor, *Regional Economics and Policy*, Wiley, 2000.
- Aubyn, St., M, Convergence across Industrialized Countries (1890-1989): New Results Using Time Series Methods, *Empirical Economics* 24, 24-44, 1999.
- Azzoni, A., N. Menezes, T. Menezes, R. Silveira, *Geography and Regional Income Convergence among Barazilian States*, Department of Economics, University of Sao Paulo, Brazil, 2000.

- Badinger, H., W.G. Muller, G. Tondl, Regional Convergence in the European Union (1985-1999): A Spatial Dynamic Analysis, HWWA Discussion Paper No. 210, 2002.
- Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2012.
- Barro, R. J., Economic Growth in a Cross Section of Countries, Quarterly Journal of Economics 106 (2), 407-443, 1991.
- Barro, R. J., X. S. Martin, Convergence Across States and Regions, Brooking Papers on Economic Activity 1, 107-182, 1991.
- Barro, R.J., N. G. Mankiw, X.S. Martin, Capital Mobility in Neoclassical Models of Growth, The American Economic Review 85 (1), 103-115, 1992.
- Baumol, W., Productivity Growth, Convergence and Welfare: What the Long-Run Data Show, The American Economic Review, 76 (5), 1072-1085, 1986.
- Bernard, A.B., S.N. Durlauf, Convergence in International Output, Journal of Applied Econometrics 10, 97-108, 1995.
- Bond, S., A. Hoeffler, J. Temple, GMM Estimation of Empirical Growth Models, Paper at Department of Economics, University of Bristol, UK, 2001.
- Bond, S., R. Blundell, Initial Condition and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models, Journal of Econometrics 87, 115-143, 1998.
- Capello, R., Regional Economics, Routledge, 2007.
- Cheng, K. L., Y.K. Kwan, What Are the Determinants of the Location of Foreign Direct Investment? The Chinese Experience, Journal of International Economics 51, 379-400, 2000.

- Chimudu, J. I., *The Impact of One Village One Product (OVOP) on Household Income Implications on Food Security: The Case of Bvumbwe Operation Area, Thyolo District, Malawi*. Thesis, Egerton University, 2007.
- Démurger, S., *Infrastructure Development and Economic Growth: An Explanation for Regional Disparities in China?*, *Journal of Comparative Economics* 29, 95-117. 2001.
- Dipta, W., *OVOP Terbukti Tingkatkan Pendapatan Daerah*, Publikasi di Internet dari Harian Ekonomi Neraca, 2009.
- Dunning, J., *International Production and the Multinational Enterprises*. London, George Allen and Unwin, 1981.
- Firdaus, M. Z. Yusop, *Dynamic Analysis of Regional Convergence in Indonesia*, *International Journal of Economics and Management* 3, 73-86, 2009.
- Firdaus, M., *Disparity of Investment Inflows among Regions in Indonesia*, *Economic Journal of Emerging Markets*, 2, 237-250, 2010.
- Firdaus, M. Krismanti, W. Rindayati, *The Dynamics of Regional Disparity in Java Island after Fiscal Decentralization*, *International Journal of Economics and Management* 6, 150-166, 2012.
- Garcia, J. G., L. Soelistianingsih, *Why Do the Differences in Provincial Income Persists in Indonesia?* *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 34, 95-120, 1998.
- Gezici, F., G. J. D. Hewings, *Regional Convergence and the Economic Performance of Peripheral Areas in Turkey*, *Review of Urban & Regional Development Studies* 16, 113-13, 2004.

- Guimaraes, P., O. Figueiredo, Agglomeration and the Location of Foreign Direct Investment in Portugal, *Journal of Urban Economics* 47, 115-135, 2000.
- Hayashi, F., *Econometrics*, Princeton University Press, USA, 2000.
- Kaldor, N., The Case for Regional Policies, *Scottish Journal of Political Economy* 18, 337-348, 1970.
- Kementerian Koordinator Perekonomian, *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025*, Cetakan Pertama, 2011.
- Krugman, P., Increasing Returns and Economic Geography, *Journal of Political Economy* 99(3), 483- 499, 1991.
- Kuncoro, M., Economic Geography of Indonesia: Can MP3EI Reduce Inter-Regional Inequality?, *South East Asia Journal of Contemporary Economics, Business and Law* 12, 17-33. 2013.
- Lessmann, C., *Regional Inequality and Decentralization – An Empirical Analysis*, Universitat Dresden, 2011.
- Li, S. Z. Xu, The Tren of Regional Income Disparity in the People's Republic of China, *ADB Institute Discussion Paper* 85, 2008.
- Lucas, R., On the Mechanics of Development Planning, *Journal of Monetary Economics* 22, 3-42, 1988.
- Mankiw, N.G., D. Romer, D.N. Weil, A Contribution to Empirics of Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics* CVI, 427-437, 1990.
- McCann, P., *Regional and Urban Economics*, Oxford University Press, 2001.

- Mishra, S. C. *Economic Inequality in Indonesia: Trends, Causes and Policy Response*. 2009.
- Myrdal, G., *Economic Theory and Under-Developed Regions*, Duckworth, London, 1957.
- Oberman, R., R. Dobbs, A. Budiman, F. Thompson, M. Rosse, *The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential*, McKinsey Global Institute, 2012.
- Romer, D., *Advance Macroeconomics, Third Edition*, McGraw-Hill, USA, 2006.
- Resosudarmo, B. P., D. A. Nurdianto and D. Hartono, *The Indonesian Inter-Regional Social Accounting Matrix for Fiscal Decentralization Analysis*, *Journal of Indonesian Economy and Business*, 24, pp. 145–162, 2009.
- Romer, P., *Increasing returns and long-run growth*, *Journal of Political Economy* 94, 1002–37, 1986.
- Routray, J. K., *One Village One Product: Strategy for Rural Sustainable Development in Thailand*, *Cab Calling edisi* January-March 2007.
- Sakamoto, H., *the University of Kitakyushu Working Papers Series Vol. 2013-01*, 2013.
- Shankar, R., A. Shah, *Bridging the Economic Divide within Nations: a Scorecard on the Performance of Regional Development Policies in Reducing Regional Income Disparities*, *World Bank Working Papers Series* 2001.
- Soenandar, E. S., *Government Policy in Solving Uneven Regional Development between West and East Indonesia: Case Study on KAPET*, *Economic Journal of Hokkaido University* 34, 171-192, 2005.

- Strategic Asia. Implementing Indonesia's Economic Master Plan (MP3EI): Challenges, Limitations and Corridor Specific Differences. 2012.
- Sumedi. 2013. Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap Perekonomian Daerah dan Kemiskinan dalam Kerangka Kebijakan Fiskal. Disertasi. IPB. Bogor.
- Takeda, T., R. Nakata, Regional Disparities in Indonesia, OECF Research Papers 23, June 1998.
- Van der Eng, Indonesia's Growth Experience in the 20th Century: Evidence, Queries, Guesses, Working Papers, Faculty of Economics and Commerce The Australian National University, 2000.
- Verbeek, M., Modern Econometrics, John Wiley and Sons Inc., USA, 2004.
- Williamson, J. G., Regional Inequality and the Process of National Development, Development and Cultural Change 133-45, 1965.
- Yudong, Y., M. Weeks, Provincial Income Convergence in China, 1953-1997: A Panel Data Approach, 2000.
- Zheng, Y., Chen, M., China's Regional Disparities and Its Policy Responses, China Policy Institute the University of Nottingham, Briefing Series 25, 2007.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ketua dan Anggota Senat Akademik IPB, Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar IPB. Kepada Rektor IPB, Prof Herry Suhardiyanto dan jajaran Wakil Rektor IPB: Prof Yonny Koesmaryono, Prof Hermanto Siregar, Prof Anas M. Fauzi dan Dr Arief Imam Suroso, saya ucapkan terima kasih atas bimbingan Bapak-Bapak semua. Kepada *mas* Arief Imam terima kasih atas nasihat-nasihatnya. Kepada *bang* Hermanto, terima kasih atas saran sejak saya mulai memilih topik dan metodologi dalam disertasi, dan khususnya juga untuk koreksi terhadap makalah orasi ini. Kepada Prof Rizal Syarief terima kasih atas bimbingannya, khususnya untuk review dan masukan terhadap makalah orasi. Terima kasih kepada para Dekan atas kehadiran, doa dan dukungan semangatnya. Kepada Prof Endang Suhendang atas dukungan dan nasihatnya.

Saya menyampaikan penghargaan kepada Kepala Bagian Ekonomi Regional dan Kelembagaan, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Dekan FEM IPB serta Ketua dan Anggota Senat Akademik FEM IPB. Terima kasih *bang* Yusman dan *bang* Dedi, atas bimbingan dan nasihat selama ini. Kepada Direktorat Administrasi dan Kependidikan IPB terima kasih untuk dukungan dalam persiapan acara orasi ilmiah ini. Terima kasih kepada rekan-rekan di FEM IPB: Koordinator Unit Penjamin Mutu, Ketua dan Sekretaris Departemen, para Kepala Bagian dan staf pengajar serta tenaga kependidikan. Terima kasih pula kepada para Pengurus DKM Al-Hurriyah IPB atas doa dan semangatnya.

Kepada rekan-rekan dari Pusdiklat Keuangan Umum Kementerian Keuangan, Dirjen Bangda Kemendagri, PRES Bank Indonesia, World Bank, saya ucapkan penghargaan atas kesempatan mengaplikasikan disiplin ilmu khususnya Ekonomi Regional dan Ekonometrika Data Panel.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada mendiang Dr SMH Tampubolon: pembimbing S1 saya. Kepada Dr Sri Hartoyo, Prof Dr Sri Utami Kuntjoro dan Yayah Wagono, MSc: pembimbing S2. Juga kepada Assoc Prof Zulkornaen Yusof, Prof Muzzafar Shah H dan Prof Zakariah A Rashid, sebagai supervisor disertasi.

Tentunya terima kasih tidak luput saya sampaikan kepada Prof Bunasor Sanim yang senantiasa membimbing sejak kuliah. Terima kasih *pak* atas jalan beasiswa doktornya. Kepada Ibu Prof Sjafrida Manuwoto dan Bapak Dr Manuwoto yang selalu memberikan semangat dan nasihat untuk “senantiasa mengabdikan diri bagi kemajuan IPB dan kualitas hidup bangsa”. Kepada Prof MA Chozin terima kasih atas rekomendasi semasa melanjutkan pendidikan doktor.

Kepada Prof Roedhy Poerwanto, Prof (almh) Sriani S, Prof Sobir, Dr Darda Efendi, Dr Rahmat S, teh Eri Harti, mas Kusuma Darma, mas Endang Gunawan dan rekan-rekan sejawat PKBT/PKHT IPB yang tidak dapat disebut satu per satu, terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya selama saya di-gembleng dalam bidang buah tropika.

Untuk rekan-rekan Wakil Dekan di IPB, Direktorat Kemahasiswaan, jajaran Direktur dan Kepala Kantor, yang tidak saya dapatkan sebutkan satu-persatu namanya; terima kasih atas doa dan dukungan

moralnya. Kepada Bapak Dr Pallawaruka, Dr Rimbawan, dan Dr Sudradjat: terima kasih atas bimbingan kemahasiswaannya. Kepada para senior di Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB a.l. Prof Didin S Damanhuri, Prof Rina Oktaviani, Prof Noer Azam, Prof Bambang Juanda, Dr Arief Daryanto, Dr Idqan Fahmi atas petunjuk dan wejangnya. Kepada Dr Netti Tinaprilla dan mas Rahmat Yanuar atas kebersamaannya sejak mengelola ekstensi Agribisnis, dan kepada semua senior yang tidak dapat saya sebut satu per satu. Kepada rekan sejawat dan para junior: mudah-mudahan bisa segera menyusul. Terkhusus pula kepada Dr Harianto: terima kasih atas kesempatan “magang” pertama saat baru menjadi dosen di Jurusan Sosek, dan bimbingannya selama ini.

Untuk rekan-rekan pengurus DKM Al-Hurriyah IPB, terima kasih atas doa dan dukungannya. Kepada *bang* Lukman M Baga dan *mbak* Dewi saya mengucapkan ribuan terima kasih atas doa, bimbingan dan nasihatnya. Kepada teman-teman angkatan 28 IPB, rekan-rekan EPN 1996 dan semua adik-adik angkatan di IPB yang tidak dapat diucapkan satu per satu, saya ucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya.

Terima kasih secara khusus juga saya sampaikan kepada Ibu Yayah K Wagiono dan (alm) Bapak Wiroto Wagiono, atas doa dan bimbingan sejak saya menyelesaikan S1, menjadi peneliti di PKBT IPB dan dosen di Jurusan Sosek Faperta IPB; terkhusus pula untuk masukan makalah orasi ini.

Saya juga menghaturkan terima kasih kepada Ayah dan mama: Dr Asril Darussamin dan Ayuni Dewi atas doa dan dukungannya. Kepada Drh Fauziah Asril Darussamin, terima kasih atas segala kontribusinya.

Ucapan penghargaan yang tak terhingga saya sampaikan kepada keluarga besar di Jambi. Kepada semua Kakanda dan suami/istri: Khairul Anwar, S. Zuraitha, S. Nurafrida, Salman Alfarisi, Nailul Authar, dan Taufiq Q serta keponakan; atas doa, bimbingan dan dukungannya selama ini. Secara khusus kepada kakanda Dr Saad Murdy dan Rosjunaida, yang sudah membesarkan adinda sejak tamat Sekolah Dasar hingga bisa menyelesaikan kuliah di IPB.

Kepada Ayahnda KH Raden Usmandung, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, pengorbanan yang tiada henti. Doa dan ucapan terima kasih terbesar saya sampaikan kepada Ibunda H S. Zubaidah (alm), atas pengorbanan, doa dan semangat tiada putus sehingga ananda berhasil melaksanakan orasi pengukuhan Guru Besar pada hari ini. Terakhir terima kasih kepada Ananda Fayruz Firdaus; *sayang selalu* dari ayahnda. Maafkan atas ketidaksempurnaan ayahnda saat ini dalam mengasuh dan membesarkan ananda.

Alhmdulillah, semoga Allah senantiasa menjaga hati ini untuk selalu tawadhu dan tidak menjadi sombong dengan nikmat dan ujian menjadi Guru Besar ini. Amin.

Riwayat Hidup (5 Tahun Terakhir)

I. Identitas Diri

Nama Lengkap	Prof Dr Muhammad Firdaus, SP, MSi
Jabatan Fungsional	Guru Besar (terhitung 2 September 2013)
NIP	19730501 199702 1 001
Tempat dan Tgl Lahir	Muara Bungo, 5 Januari 1973
Alamat Rumah	Jl. Radar Baru RT 003/02 No. 37 Margajaya Bogor Barat Bogor
Nomor HP	08129291996
Alamat Kantor	Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
Nomor Telepon / Fax	0251 – 8626602 Fax : 0251 – 8626602
Alamat e-mail	firdausfemipb@yahoo.com
Mata Kuliah yang diampu	Ekonometrika Dasar dan Lanjutan, Ekonomi Regional, Makroekonomi, Ekonomi Umum
Pengalaman Karir	- Wakil Dekan FEM IPB - Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kab. Bogor - Sekretaris DKM Al-Hurriyah IPB - Sekretaris PKBT IPB - Peneliti Tamu World Bank, Bank Indonesia, IDB
Keanggotaan Profesi	Spatial Econometrics Association, ISSAAS, IRSA, PERHEPI, ISEI

II. Riwayat Pendidikan

Program	S1	S2	S3
Nama PT	Institut Pertanian Bogor	Institut Pertanian Bogor	Universiti Putra Malaysia
Bidang Ilmu	Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya	Ekonomi Pertanian	Economics
Tahun Masuk	1991	1996	2000
Tahun Lulus	1996	1998	2006
Nama Pemimbing/ Promotor	Dr Ir SMH Tampubolon	Dr Ir Sri Hartoyo	Assoc Prof Zulkornaen Yusop

III. Pengalaman Penelitian

Tahun	Judul Penelitian	Donor
2012-2013	Kajian RKPD Kab. Indragiri Hulu	Bappeda
2012-2013	Peningkatan Produktivitas Hortikultura Melalui Integrasi Analisis Bisnis dan SOP dalam Perangkat Lunak	Kemendikbud
2013	Prototipe Inovasi Pengembangan Pepaya pada Lahan Sub Optimal dengan Penguatan Kelembagaan Kemitraan	KMNRT
2013	Kajian Keterbelakangan Teknologi dalam Pembangunan Ekonomi	Aliansi Kebangsaan
2013	Kajian Pemetaan dan Insentif Penanaman Modal Negara Pesaing Utama Indonesia	BKPM

Tahun	Judul Penelitian	Donor
2012	Kajian RKPD Kab. Tulang Bawang Barat	Bappeda
2012	Kajian Grand Design Pembangunan Peternakan Kab. Indragiri Hulu	Bappeda
2012	Dampak Situasi Makroekonomi terhadap Kinerja Keuangan PT. BRI	BRI
2012	Kajian Cadangan Pangan Strategis: Beras, Cabai dan Ayam Pedaging	BI
2012	Integrasi Analisis Ekonomi dan SOP Melon dan Jeruk	Kementan
2012	Akselerasi Diseminasi Prototipe Industri Kecil <i>Soft Candy</i> Di Sentra Produksi Buah	KMNRT
2011	Kajian Cetak Biru Penanaman Modal Kab. Padang Lawas	Bappeda
2011	Strategi Penetrasi Industri Pengolahan Buah ke Pasar Modern	Kementan
2011	Pengembangan Model Tecno Busines Service untuk Meningkatkan Daya saing Buah Tropika Indonesia	KMNRT
2010	<i>Economic Estimation and Determinants of Zakah Potential in Indonesia</i>	IDB
2001-2010	Riset Unggulan Strategis Nasional (RUSNAS) Buah	KMNRT
2008-2010	<i>Who is Benefiting Fertilizer Subsidies in ? Indonesia?</i>	World Bank
2009	Pengembangan Model Pembiayaan <i>on the Plant Basis</i> untuk Belimbing, Jambu Air dan Pisang	Deptan

Tahun	Judul Penelitian	Donor
2009	Penyusunan Model Insentif Pengembangan Penanaman Modal Agroindustri	BKPM
2009	Sistem Informasi Kelayakan Usaha Hortikultura berbasis <i>Standard Operation Procedure</i>	Deptan
2008	<i>Assesing the Quantitative Methodology of Trade and Investment Competitiveness</i>	Partership-Bappenas
2008	Strategi Kebijakan Perberasan Nasional	Deptan
2008	Evaluasi Pasar Tani Indonesia	Deptan
2008	Kajian Prospek Benih Transgenik di Indonesia	Monshanto

IV. Pengalaman Sebagai Penulis Pertama Artikel Jurnal

Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ No	Nama Jurnal
2012	<i>The Dynamics of Regional Disparity in Java Island after Fiscal Decentralization</i>	Vol. 6 No. 1	International Journal of Economics and Management (Terindeks Scopus)
2012	<i>Integration among Regional Vegetable Markets in Indonesia</i>	Vol. 18 No. 2	ISSAAS Journal (Terindeks Scopus)
2012	<i>Estimation and Determinants of Zakah Potential in Indonesia</i>	WP-1433-07	IRTI Working Papers

Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ No	Nama Jurnal
2012	<i>Exploring the Indonesian Economic Landscape and Structural Change</i>	Vol. 27 No. 1	Journal of Indonesian Economics and Business (Akreditasi DIKTI)
2011	<i>Who is Benefiting from Fertilizer Subsidies in Indonesia?</i>	WP 5258	World Bank Working Papers
2010	<i>Disparity of Investment Inflows among Regions in Indonesia</i>	Vol. 3 No. 2	Economic Journal of Emerging Market (Akreditasi DIKTI)
2010	<i>Feasibility Analysis of Integrated Broiler Production</i>	Vol. 2 No. 3	Media Peternakan (Akreditasi DIKTI)
2010	<i>Effect of Global Crisis on Indonesia's Agribusiness Export</i>	Vol. 2 No. 3	AFBE (Terindeks CABELL, Texas)
2009	<i>Does the Rank-Size Rule Matter in Indonesia? Journal of Indonesian Economics and Business</i>	Vol. 25 No.1	Journal of Indonesian Economics and Business (Akreditasi DIKTI)
2009	<i>Dynamic Analysis of Regional Income Convergence in Indonesia</i>	Vol. 1 No. 3	International Journal of Economics and Management (Terindeks Scopus)
2008	Permintaan Pisang, Pepaya dan Jeruk di Pulau Jawa.	Vol. 8 No. 1	SOCA (Akreditasi DIKTI)

Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ No	Nama Jurnal
2008	Daya Saing Usahatani Durian di Sumatera Barat	Vol. 7 No. 2	Jurnal Manajemen dan Pembangunan
2008	Daya Saing Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia di Pasar Amerika Serikat	Vol 1 No. 1	Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan

V. Pengalaman Penulisan Buku

Tahun	Judul Buku	Sebagai Penulis
2011	Aplikasi Ekonometrika untuk Data Panel dan Time Series	Pertama
2011	Aplikasi Metode Kuantitatif untuk Manajemen dan Bisnis	Pertama
2010	Manfaat Ekonomi Jagung Transgenik	Ketiga
2008	Swasembada Beras dari Masa ke Masa	Pertama
2008	Fenomena Turunnya Minat terhadap Perguruan Tinggi Pertanian	Ketiga
2008	Ekonomi Regional	Ketiga
2008	Aplikasi Komputer untuk Metode Kuantitatif dalam Manajemen dan Bisnis	Pertama
2007	Aplikasi Komputer untuk Analisis Deret Waktu Satu ragam	Pertama

VI. Pengalaman Menjadi Instruktur Pelatihan

Tahun	Judul Pelatihan	Peserta
2009-2013	Data Panel Dinamik	PRES (PPSK, DPSK) Bank Indonesia
2013	<i>Sosio Economic Refresher Training</i>	Staf Dept of Agriculture Timor Leste
2013	<i>The ALUE Open Seminar (Business Tren in Indonesia)</i>	Pengusaha Muda Jepang
2010-2012	Ekonometrika untuk Keuangan	Staf Kementerian Keuangan
2011-2012	Metodologi Penelitian	Staf Kementerian Keuangan
2009	<i>Computable General Equilibrium</i>	Dosen UPM
2009	Data Panel Statik dan Dinamik	Peserta IRSA

VII. Pengalaman Sebagai Pembicara Seminar/ Lokakarya

Tahun	Judul Seminar/Lokakarya	Penyelenggara
2013	Appraisal Policy Support and Role of Innovation in Agroindustry Development	FAO and HUA
2013	Penentuan Komoditas <i>Special Products</i> dalam Rangka Ketahanan Pangan untuk MC9 WTO	Kemendag
2013	Pembangunan dan Politik Agribisnis	Yayasan Bina Desa Indonesia
2013	Stabilisasi Harga dan Pengembangan Kelembagaan Pangan	Staf Khusus Presiden

Tahun	Judul Seminar/Lokakarya	Penyelenggara
2013	Upaya Penyerasian Pembangunan Wilayah	Kemendagri
2013	Efisiensi Perbankan Islam vs Konvensional	Bank Indonesia
2012	Inovasi Mahasiswa Pertanian Indonesia “Agrotechnopreneur untuk Negeri”	UKM FORCES IPB
2012	Strategi untuk Stabilisasi Harga Beras	Bank Indonesia
2012	<i>The Performance of Indonesian Agricultural Sector</i> bersama Prof Anne Booth (SOAS – University of London)	FEM IPB dan PERHEPI
2012	Dampak Dana Transfer terhadap Kemandirian Fiskal dan Ekonomi Kab/Kota di Pulau Jawa	Dewan Perwakilan Daerah
2012	Peran IPB dalam Pembangunan Pertanian Nasional	University of Khairun Ternate
2012	Volatilitas Harga Pangan di Indonesia	Kemenkeu
2011	<i>State of the Art and Prospect of Urban Agriculture in Indonesia</i>	Universitas Kasetsart
2011	Konvergensi antar Kabupaten di Pulau Jawa	IRSA
2010	Prospek Pertanian dalam Menghadapi Era Pasar Bebas	Universitas Jambi
2010	<i>The Effect of the Global Economic Crisis on Business in Southeast Asia</i>	IPB-AFBE
2010	<i>Indonesian Interregional Trade: What Can be Revealed from a Gravity Modeling?</i>	IRSA

VII. Perolehan HAKI

Memperoleh 3 hak cipta untuk perangkat lunak Sistem Informasi Kelayakan Usaha Hortikultura (SIKUH) untuk cabai, kentang, serta pepaya-pisang-jeruk. Sedang didaftarkan 2 SIKUH baru untuk komoditas tomat dan melon.

